

Tirta PELA

Monthly Newsletter

Media Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut

Edisi ini :

3 *Bubuhan :*

Trimanto,
Guru Yang Peduli
Teluk Balikpapan

4 *Opini :*

Kompleksitas
Pengelolaan Wilayah
Pesisir

5 *Cukilan :*

Konperensi
International Pertama
Coastal Zone Asia
Pacific

6 *Ragam Selingan :*

Dilema Pengelolaan
Kawasan Pesisir Teluk
Adang dan Teluk Apar

7 *Ragam Tahunkah Anda :*

Beberapa Jenis Burung
yang Ditemukan di
Teluk Balikpapan

8 *Ragam Daftar Istilah :*

8 *Kuis :*

Proses panjang
penyusunan Renstra
Pengelolaan
Terpadu Teluk
Balikpapan

Mak Acil :
Nah, tinggal adopsi dan
implementasinya nih..., kapan ya?

Beranda

Renstra Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan

*P*roses Panjang Penyusunan Suatu Perencanaan Pengelolaan Teluk.

Teluk Balikpapan terletak di antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (hasil pemekaran Kabupaten Pasir). Teluk ini telah memberi kontribusi dalam perkembangan dan pembangunan kedua daerah administrasi tersebut secara khusus maupun untuk Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Di teluk ini terdapat fasilitas pelabuhan dan dermaga yang melayani penumpang maupun barang serta fasilitas pendukung bagi kegiatan industri minyak dan gas. Selain itu, terdapat pula beberapa industri perkayuan yang menghasilkan barang jadi berupa plywood dan bentuk kayu gergajian lainnya.

beberapa kegiatan yang dapat mempengaruhi kondisi perairan teluk, contohnya adalah aktivitas pembukaan lahan HPH, HTI, perkebunan, dan masyarakat peladang. Aktivitas mereka pada saat ini menimbulkan dampak pada meningkatnya bahaya erosi dan kandungan sedimen yang dibawa oleh aliran permukaan (*run-off*). Hal ini dapat menimbulkan pendangkalan di bagian hilir atau di perairan teluk, sehingga kapal atau aktivitas lainnya terhambat. Apabila fungsi produksi perairan teluk menjadi hilang karena perubahan kondisi ekosistem maka baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat sehingga untuk menanggulangnya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Pada bagian hulu dari daerah aliran sungai (DAS) Teluk Balikpapan terdapat

ke hal. 2 **RESTRA PENGOLAHAN**

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman,

Dalam rangka mengiringi kegiatan adopsi formal Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan, edisi Tirta PELA kali ini akan menampilkan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi isu dan masalah, lalu penyusunan draft Renstra hingga lokakarya dan diskusi untuk perbaikan dokumen tersebut. Pada Rubrik Bubuhan kami menampilkan profil seorang guru yang peduli akan masalah lingkungan terutama di Teluk Balikpapan

Pada edisi ini, Redaksi memberi kesempatan bagi pembaca Tirta PELA menuangkan pendapatnya mengenai kompleksitas pengelolaan wilayah pesisir yang ada sekarang dalam Rubrik Opini. Cuplikan kegiatan Konperensi Internasional Pertama yang membahas wilayah pesisir di Asia Pasifik (Coastal Zone Asia Pacific) di Thailand pada bulan Mei 2002 yang lalu, dapat anda simak dalam Cukilan. Kemudian, bagaimana dilema pengelolaan dua teluk yang berada di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur juga dapat diikuti dalam Ragam-Selingan. Sedangkan beberapa jenis burung di Teluk Balikpapan tersaji pula dalam edisi ini.

Untuk sementara, Redaksi tidak menampilkan Rubrik Kuis, namun para pemenang kuis bulan Mei 2002 yang lalu tetap ditampilkan. Tidak lupa pula, Redaksi mengharapkan masukan dari para pembaca bagi pengembangan dan perbaikan Tirta PELA. ■

Oleh karena itu, sejak tahun 1998 Proyek Pesisir Kaltim telah memfasilitasi suatu Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan. Dalam memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan, Proyek Pesisir bersama para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) memerlukan waktu yang relatif cukup lama untuk menyelesaikannya. Upaya perencanaan pengelolaan ditujukan untuk wilayah ekosistem Teluk Balikpapan yang memiliki luas lebih dari 200.000 hektare, sebagai suatu wilayah pengelolaan khusus (*special management area*) dengan mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi maupun administratif. Sedangkan tahap demi tahap yang dilakukan dalam menyusun Renstra ini mengacu pada siklus pengelolaan pesisir terpadu (*policy cycle*) yang diperkenalkan oleh Olsen (1993) dengan melalui rangkaian siklus implementasi Pengelolaan Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Management/ICM*) yang berbasiskan isu-isu prioritas. Siklus ini dimulai dari tahap identifikasi isu dan masalah hingga tahap evaluasi implementasi rencana pengelolaan nantinya. Adapun tahap-tahap tersebut dijelaskan dalam Gambar 1. Bila kita melihat pada siklus tersebut, pada dasarnya Renstra ini merupakan produk antara tahap dua dan ketiga dari siklus tersebut. Diharapkan, dokumen Renstra ini dapat diimplementasikan dalam jangka panjang dengan siklus waktu implementasi 10 sampai 15 tahun ke depan, dengan secara periodik melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan implementasinya.

Pada bulan November 1998, setelah melakukan kunjungan dan konsultasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan, Proyek Pesisir Kaltim memulai kegiatan sosialisasi bagi jajaran instansi terkait dengan pengelolaan pesisir Teluk Balikpapan di tiga wilayah administrasi tersebut. Mereka menjadi tujuan awal karena merupakan pemangku kepentingan yang selama ini bergerak di wilayah pesisir dan laut Teluk Balikpapan dan memiliki kepentingan serta tanggung jawab untuk mengelola sumberdaya yang ada seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 22 tahun 1999.

Dalam proses perencanaan penyusunan Renstra Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan ini ditempuh upaya partisipatif, dengan berbasiskan kepada isu-isu pengelolaan tertentu yang telah memperoleh prioritas pengelolaan dari para pemangku kepentingan. Kemudian pada saat yang bersamaan dengan kegiatan sosialisasi tadi, dilakukan pula identifikasi isu dan masalah di wilayah DAS Teluk Balikpapan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir Kaltim bersama para pemangku kepentingan lainnya yang sebagian besar terdiri dari jajaran instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di tiga daerah

administrasi yang terlibat dalam pengelolaan pesisir, laut dan DAS Teluk Balikpapan. Pada proses yang berlangsung selama kurang-lebih 18 bulan sejak Oktober 1988, telah berhasil dilaksanakan identifikasi serta analisis isu dan permasalahan pengelolaan wilayah Ekosistem Teluk Balikpapan.

Analisis-analisis dilakukan dengan dukungan sejumlah penelitian dan survei serta pemantauan di lapangan (Juni – Agustus 1999, 2000 dan 2002) mengenai kondisi hutan mangrove, perikanan, kualitas air dan hidrooceanografi. Kemudian isu-isu yang telah diseleksi memang benar-benar isu yang ada di lapangan. Selain melalui kegiatan-kegiatan lapangan, isu dianalisis dan dikaji melalui dua kali lokakarya partisipatif (Januari dan Oktober 1999), isu-isu pengelolaan hasil identifikasi kemudian diklarifikasi, diverifikasi dan didistribusikan, lalu dianalisis serta diprioritaskan bersama para pemangku kepentingan.

Setelah isu prioritas terkumpul, proses dilanjutkan dengan Lokakarya Penyusunan Draft Awal Rencana Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan yang dimulai pada Oktober 2000. Kegiatan lokakarya ini dilakukan beberapa kali hingga April 2002. Selain melalui lokakarya, draft awal Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan juga didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan (Juli – Agustus 2001) untuk mendapatkan klarifikasi dan verifikasi.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan juga diintervensi dengan berbagai aksi awal (*early action*) yang dilakukan oleh Proyek

Pesisir Kaltim bersama pemangku kepentingan yang tujuannya untuk mendapatkan tanggapan di lapangan dan tanggapan ini menjadi suatu rangsangan berpikir yang kemudian diakomodasi menjadi masukan bagi proses penyusunan Renstra. Aksi-aksi tersebut seperti penanaman mangrove, pemasangan papan nama sungai, serta fasilitasi pembentukan kelompok kerja (*working group*) Erosi-Sedimentasi dan Pengelolaan Mangrove. Aksi-aksi ini memberikan andil dalam proses penyusunan Renstra karena hasil yang diperoleh di lapangan memberikan inspirasi bagi para pemangku kepentingan dalam keterlibatannya menyusun Renstra.

Proses lokakarya draft Renstra sendiri berlangsung hingga April 2002, setelah itu kegiatan lokakarya dikelola oleh suatu Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk awal Mei 2002. Tugas Pansus ini salah satunya adalah mengelola proses penyusunan draft Renstra hingga bentuk draft final. Pada tanggal 25- 26 Juni 2002, Pansus melaksanakan review akhir draft final dokumen Renstra. Dokumen ini akan segera dipublikasikan secara luas pada September 2002 dengan harapan pada Rapat Koordinasi Pembangunan di Kota Balikpapan, Kabupaten Pasir dan Provinsi Kalimantan Timur program-program Renstra ini dapat diadopsi. (as) ■



Trimanto, Guru yang peduli Teluk Balikpapan

Sosok Trimanto mungkin belum banyak dikenal orang, namun kegiatannya yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan Teluk Balikpapan telah mulai menarik perhatian masyarakat khususnya para pelajar SMU di Balikpapan. Pria kelahiran Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah pada tanggal 19 April 1961 ini aktif di organisasi lingkungan hidup khususnya lingkungan Teluk Balikpapan.

Hasnah ini, merintis pertama kali ke Balikpapan setelah tas Negeri Surakarta pada tahun 1986. Saat itu, ia di SMU Negeri 3 Balikpapan. Kebetulan sekali bagian barat Kota Balikpapan, di mana wilayah ini (DAS) Teluk Balikpapan.

Bila melihat aktivitasnya di organisasi dan 'pintar' membagi waktunya dengan keluarga. tempat tinggalnya ia dipercaya menjadi Sedangkan di tingkat masyarakat Kota sebagai Koordinator Forum Sahabat dan Ketua Badan Pengurus Yayasan (YSTB). Kedua organisasi ini peduli akan pengelolaan pesisir

Trimanto menjelaskan bahwa Balikpapan merupakan suatu oleh individu-individu yang pengelolaan Teluk Forum STB ini tidak hanya Balikpapan, tapi juga dari

Tanah Grogot, Bontang, dan Tenggarong. Forum ini diharapkan menjadi jembatan penghubung bagi para anggota agar upaya-upaya kegiatan penyelamatan dan perlindungan Teluk Balikpapan dapat terakomodir. "Untuk lebih mempercepat proses melembagakan pengelolaan Teluk Balikpapan di tingkat masyarakat, maka beberapa anggota Forum STB mendirikan Yayasan Selamatkan Teluk Balikpapan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat baik dari segi finansial ataupun teknis", ujar Trimanto menambahkan.

Apa sebenarnya yang melatarbelakangi ketertarikan Trimanto untuk berkecimpung di bidang pesisir dan laut ? Menurutny, itu semua tidak terlepas dari tugasnya selama ini sebagai seorang guru. Ia berpendapat bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan suatu bentuk ekosistem yang memiliki banyak hasil alam. Sumberdaya alam hayati yang dapat diperbarui (seperti ikan, udang, kepiting dan lain lain) maupun sumberdaya alam non hayati yang tidak dapat diperbarui (bahan galian, tambang, gelombang, air laut), layak menjadi obyek pembelajaran bagi siswa tingkat menengah. Oleh karena itu, menurutnya perlu penyebarluasan pengetahuan tentang pesisir dan laut serta apa manfaat dan dampak pengelolaan terhadap manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Ia menyadari bahwa selama ini pelajar sekolah menengah masih banyak yang belum memiliki pengetahuan tentang pesisir dan laut karena wilayahnya yang susah dijangkau baik dalam hal pembelajaran maupun sebagai daerah jelajah pengetahuan. Hal yang sama terjadi pula di masyarakat umum, kurangnya pengetahuan menyebabkan ketidakpedulian terhadap pesisir dan laut. Oleh sebab itu, kawasan ini seolah-olah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir, tidak terkecuali masyarakat nelayan yang kehidupannya bergantung dari sumberdaya pesisir dan laut.

Ayah dari Sulthon, Dede dan Putri ini berharap pengelolaan pesisir dan laut dapat dilakukan secara profesional dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada. Keinginan itu bisa dicapai apabila para pihak yang berkepentingan secara serius untuk mengelolanya dengan lestari dan bijak. Upaya pelestarian alam ini juga hendaknya disertai pula dengan adanya dukungan peraturan daerah maupun anggaran.

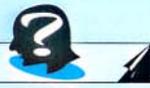
Menurutnya, dunia pendidikan yang dapat berupa pendidikan lingkungan bertugas untuk mengenalkan, menggali potensi serta cara pengelolaan yang berbasis pada kesinambungan sumberdaya alam kepada seluruh pelajar sehingga tumbuh kesadaran akan kelestarian alam untuk kesejahteraan bagi dirinya maupun generasi yang akan datang. (as/ew)



Bapak tiga anak buah pernikahannya dengan menamatkan pendidikan D2-IPA di Universitas langsung ditempatkan sebagai guru biologi sekolah tempat ia mengajar berada di termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai

masyarakat terasa sekali bahwa ia harus Selain kesibukannya mengajar, di lingkungan Ketua RT 021 Kelurahan Baru Tengah. Balikpapan Trimanto terpilih Teluk Balikpapan (Forum STB) Selamatkan Teluk Balikpapan merupakan organisasi yang dan laut Teluk Balikpapan.

Forum Sahabat Teluk lembaga yang didirikan punya kepedulian akan Balikpapan. Anggota berasal dari Kota Samarinda, Penajam,



Kompleksitas Pengelolaan Wilayah Pesisir

Membicarakan wilayah pesisir adalah hal menarik yang bisa menguras banyak energi dan perdebatan panjang tentang apa, siapa dan bagaimana seharusnya wilayah pesisir tersebut dikelola. Tetapi pembicaraan dan diskusi tersebut lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya wacana, strategi dan upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada tanpa mau melihat kondisi riil wilayah pesisir itu sendiri. Beberapa potret masyarakat pesisir seperti kemiskinan yang ditandai dengan rendahnya pendapatan, sumberdaya manusia yang rendah serta perilaku negatif yang cenderung berpola hidup boros, ketergantungan yang tinggi terhadap pemilik modal dan praktek penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) adalah realitas kehidupan masyarakat yang tak terbantahkan.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemerintah dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang populis dan sarat akan nuansa politis yang tidak lain hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi serta menarik dukungan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Hal tersebut masih ditambah dengan kualitas dan perilaku aparat atau pihak yang berwenang untuk mengelola pesisir kita acapkali salah dalam menilai kondisi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak tepat sasaran dan bukan merupakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, segala macam bentuk perencanaan yang sifatnya strategis, terpadu, terintegrasi seharusnya di-*breakdown* sampai pada kegiatan yang detail dan sifatnya teknis, karena bila tidak maka inkonsistensi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir akan kembali terulang seperti halnya pada pengelolaan hutan kita.



Wilayah pesisir selain memiliki potensi sumberdaya biofisik, manusia, dan modal maka di pesisir juga isu ancaman kerusakan lingkungan, keterbatasan arus modal dan juga kualitas sumberdaya manusia yang rata-rata rendah adalah dua kondisi yang sering kali muncul secara bersamaan. Isu kerusakan lingkungan sudah banyak di-blow up dan telah ada program-program rehabilitasi baik yang dilakukan oleh media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi sehingga upaya-upaya penanggulangan sudah mulai dilakukan secara besar-besaran. WWF, CRMP, Coremap dan The Nature Conservancy adalah sedikit dari sekian banyak lembaga yang peduli akan isu pengelolaan pesisir. Belum ada data resmi yang bisa dipercaya tentang keberhasilan dari program-program tersebut ditingkat masyarakat. Proses evaluasi seringkali dilakukan oleh pemilih proyek itu sendiri sehingga obyektivitas penilaian masih cukup bias. Mungkin kita perlu evaluator independen yang steril akan kepentingan proyek sehingga beberapa bahan pembelajaran dari program-program tersebut dapat diadopsi dan direplikasi di daerah lain. Juga yang masih kurang dalam upaya pengelolaan lingkungan pesisir adalah kebijakan makro pemerintah pusat yang dapat mengakomodir kepentingan daerah-daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di wilayah pesisir. Inisiasi pembuatan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebuah langkah maju yang harus terus dikawal prosesnya.

Kelimpahan sumberdaya perikanan, potensi pariwisata bahari yang ada

di wilayah pesisir konon sudah saatnya untuk dijadikan primadona dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara kita. Namun, sejumlah data dan realita menyebutkan bahwa eksploitasi sumberdaya perikanan secara nasional belum dapat menutup nilai kerugian yang kita alami dari pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah teritorial kita. Belum lagi, untuk pengembangan wisata bahari kita harus menanggung konsekuensi ekonomi yang tidak sedikit akibat tragedi WTC (World Trade Center) bulan September 2001, dimana isu tentang teroris internasional sungguh sangat memukul aktivitas kepariwisataan secara umum dan wisata bahari khususnya. Kesadaran bersama bangsa kita sangat diperlukan untuk membangun kembali citra Indonesia di mata dunia internasional, yang salah satu caranya adalah dengan mempromosikan atau mengkampanyekan kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di laut dan pesisir Indonesia sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke negara kita.

Pesisir dan laut memang menyimpan misteri yang besar. Strategi pengelolaan yang sebaik apapun akan menjadi tidak berarti jika dihadapkan pada realitas-realitas yang ada di masyarakat. Perbedaan agenda masyarakat, agenda pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan stakeholders lain adalah sumber dari segenap permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Ego sektoral, institusi, personal adalah penyakit lama yang memang butuh waktu untuk penyembuhannya. Supaya agenda pengelolaan pesisir dapat membumi dan mendapat respon masyarakat, maka sudah sepatutnya apabila agenda-agenda masyarakat di akomodir dan mendapat prioritas untuk dilaksanakan.

Disamping itu, peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir masih besar perannya. Tidak bisa dipungkiri aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan isu besar yang juga perlu penanganan serius. Tindak kejahatan dan upaya pencegahan kejahatan yang terjadi di laut konon lebih tinggi intensitasnya dibanding yang terjadi di darat. Keterlibatan aparat dalam praktek-praktek destruktif baik langsung maupun tidak langsung sudah saatnya untuk diakhiri. Selain kampanye untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa (*Good Governance*), maka instrumen dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di laut adalah kebutuhan yang mendesak.

Akhirnya, kebijakan makro dan mikro dalam konsep, strategi, metode dalam pengelolaan sumberdaya pesisir adalah dua hal yang harus seiring sejalan. Sinkronisasi adalah kata kunci, karena kompleksitas persoalan di pesisir butuh solusi yang cepat dan tepat dalam penanganannya sehingga nilai manfaat dari ketersediaan sumberdaya tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan cara demikian, maka pengelolaan pesisir yang terpadu dan berbasis masyarakat dapat menjadi kenyataan.

Mohamad Abdi
Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Yayasan Konservasi Laut
■ (YKL) Indonesia

KONPERENSI INTERNATIONAL PERTAMA COASTAL ZONE ASIA PACIFIC



Pada pertengahan bulan Mei 2002 yang lalu, telah digelar Konperensi Internasional Pertama mengenai Kawasan Pesisir di Asia Pasifik, yang dikenal dengan Coastal Zone Asia Pasific (CZAP). Konperensi yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 12-17 Mei 2002 ini diadakan atas kerja sama berbagai lembaga diantaranya Pusat Pengembangan Pesisir (Coastal Development Center/CDC) Thailand, Universitas Kasetsart, Universitas Chulalongkorn, Pusat Pengembangan Perikanan Asia Pasifik (SEAFDEC), Komisi Oceanografis antar Pemerintah – UNESCO, Institut Ilmu Kelautan Virginia (VIMS) Amerika Serikat. Selain itu, beberapa lembaga turut mendukung konperensi tersebut diantaranya adalah Lembaga Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID), National Science Foundation Amerika Serikat, NOAA/ National Ocean Service Amerika Serikat, OXFAM Amerika Serikat, dan Bank Dunia.

Konperensi internasional pertama ini diselenggarakan sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan untuk berbagi dan mengadopsi program pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang teruji, layak dan praktis. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kawasan pesisir di hampir seluruh pelosok Asia Pasifik telah dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan

umum Konperensi CZAP adalah untuk menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan prakarsa penelitian, program pendidikan dan peningkatan kapasitas, mekanisme pertukaran informasi, dan menyusun kebijakan pengelolaan pesisir terpadu. Semuanya ini diharapkan bermuara pada meningkatnya status kawasan pesisir di Asia Pasifik.

Peserta konperensi dari Kalimantan Timur (Kaltim) diwakili oleh H. Yusran (Pejabat Pelaksana Harian/PLH Bupati Penajam Paser Utara) dan H. Asmuni Samad (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Paser), yang didampingi oleh Niel Makinuddin (Proyek Pesisir Kaltim). Konperensi ini dihadiri oleh negara-negara di Asia Pasifik seperti Fiji, Filipina, Australia, India.

Pada konperensi yang dilaksanakan di Hotel Montien Riverside tersebut, peserta dari Kaltim mendapat kesempatan untuk mempresentasikan makalah dengan judul *"Changing Political Paradigm through Integrated Coastal Management in Balikpapan Bay, Indonesia"*. Secara garis besar, makalah tersebut menjelaskan program kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Paser, Kota Balikpapan dan Provinsi Kaltim dalam upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Teluk Balikpapan dengan pendekatan ekosistem. Dalam konperensi dengan tema "Meningkatkan Status Kawasan Pesisir di Asia Pasifik" ini, para peserta berkesempatan untuk saling tukar pengetahuan, pengalaman dan praktik-praktek pengelolaan kawasan pesisir dengan beberapa peserta dari belasan negara di Asia Pasifik. Melalui konperensi ini pula terbuka peluang untuk membangun kerja sama antar negara peserta.

Konperensi CZAP I ini sengaja dirancang untuk mendorong sebesar-besarnya interaksi di antara berbagai peserta dan berorientasi pada produk atau hasil. Komponen utama konperensi ini terbagi dua sesi. Pertama, sesi teknis yang berisi berbagai penyajian kertas kerja ilmiah, pameran poster, dan penayangan video. Sesi ini dimaksudkan agar para peserta dapat saling berbagi pengalaman mengenai tantangan, peluang, dan praktik-praktek terobosan dalam upaya pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu di Asia Pasifik. Kedua, sesi kelompok kerja yang dilaksanakan di siang dan sore untuk menemukan masalah dan menyusun rencana kerja.

Akhirnya, dalam konperensi yang berlangsung selama enam hari itu dihasilkan beberapa kesepakatan mengenai : 1) pertukaran berbagai pendekatan inovatif dalam rangka meningkatkan status dari berbagai kawasan pesisir di Asia Pasifik; 2) tersusunnya rencana kerja yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, pendidikan, mekanisme pertukaran informasi, dan kebijakan terpadu pengelolaan kawasan pesisir; dan 3) berbagai tindak lanjut, misalnya terbentuknya jaringan praktisi pengelola kawasan pesisir, kerjasama pengelolaan pulau kecil antara Pemerintah Fiji dengan Indonesia, keberlanjutan mekanisme pertukaran informasi melalui jaringan internet (*Coastal Project web-based*).

Dalam pelaksanaan Konperensi CZAP I, sesungguhnya ada banyak pengalaman dan pengetahuan yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam pengelolaan kawasan pesisir. Namun, bentuk akhir dan keberhasilan pelaksanaannya memerlukan komitmen dan peran serta dari berbagai pihak pemangku kepentingan di kawasan itu. Mengapa? Karena persoalan yang dihadapi kawasan pesisir Asia Pasifik sangatlah kompleks dan ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak. (nm/ew) ■

DILEMA PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR TELUK ADANG DAN TELUK APAR



Kabupaten Pasir dengan luas wilayah kurang lebih 14.937 kilometer persegi, meliputi 12 kecamatan dan 152 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 269.921 jiwa pada tahun 2001. Kawasan pembangunan yang direncanakan terdiri dari tiga yaitu : kawasan pedalaman, kawasan tengah, dan kawasan pantai. Saat ini apabila dilihat dari kelengkapan fisik dan prasarana serta infrastruktur sekaligus tingkat roda perekonomian, kawasan tengah lebih maju dibandingkan dengan kawasan pedalaman dan kawasan pantai. Hal ini disebabkan anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasir sebelum era otonomi daerah sangatlah terbatas jika dibanding dengan luas wilayah yang harus ditangani.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dimana berbagai kewenangan dititikberatkan pada daerah kabupaten maupun kota, maka kegiatan pembangunan semakin meningkat. Walau peraturan pemerintah pendukung Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini masih belum banyak. Dalam upaya memperkecil kesenjangan pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Pasir menitikberatkan pembangunan di kawasan pedalaman dan pantai dengan membuka berbagai akses jalan serta meningkatkan pembangunan yang sudah ada. Khusus untuk kawasan pesisir Kabupaten Pasir terdapat tiga kawasan teluk yang meliputi Teluk Balikpapan (teluk ini telah menjadi bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara), Teluk Adang dan Teluk Apar.

Di kawasan pesisir Teluk Adang terdapat beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Kuaro, dan Tanah Grogot. Sedangkan di Teluk Apar terdapat Kecamatan Pasir Balengkong dan Tanjung Aru. Potensi dari kedua kawasan teluk tersebut sangat besar dan menjanjikan untuk kegiatan perikanan, sehingga saat ini pembukaan tambak semakin meluas dan meresahkan Pemerintah Kabupaten Pasir.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kabupaten Pasir, kawasan Teluk Adang dan Teluk Apar merupakan kawasan yang dilindungi sebagai cagar

alam. Penetapan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 837/Kpts/UM/II/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Selain itu, Keputusan Presiden (Keppres) No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, juga mendukung penetapan kedua teluk ini menjadi kawasan lindung. Dalam Keppres itu terdapat kriteria penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam yaitu : kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistem; mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun; mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisik yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas.

Kawasan Teluk Adang dan Teluk Apar pada saat penetapannya sebagai kawasan cagar alam sangat bersifat *top down*, sentralistik serta sektoral karena tidak melihat kondisi yang ada di lapangan. Seiring dengan desentralisasi atau pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir. Apabila dikaitkan dengan paradigma pembangunan saat ini, wilayah pesisir dan laut mulai mendapat prioritas dalam program pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tidak boleh bersifat sektoral serta melihat berbagai potensi dan ancamannya. Potensi perikanan khususnya budidaya tambak yang dimiliki kawasan pesisir saat ini tentunya tidak dapat di pungkiri, apalagi pada saat krisis ekonomi harga udang hasil tambak cukup tinggi sehingga memicu masyarakat untuk membuka tambak. Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasir, luas tambak yang sudah berproduksi di kawasan Teluk Adang dan Teluk Apar pada tahun 2001 sekitar 737,96 hektar. Sedangkan yang belum berproduksi seluas 259,3 hektar. Sebagian besar areal pertambakan tersebut berada di dalam kawasan cagar alam Teluk Adang dan Teluk Apar. Apabila dihitung Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan pada objek pajak lahan perkebunan, dimana lahan yang telah berproduksi Rp. 1.700/meter persegi dan belum berproduksi Rp. 910/meter persegi dan dikalikan dengan data dari luasan tersebut di atas maka diperoleh pendapatan lebih kurang 14 milyar rupiah setiap tahun.

Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga mengacu pada aspek lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Pasir menyadari bahwa pembukaan tambak secara besar-besaran dan tidak terkendali telah meningkatkan laju degradasi hutan mangrove. Padahal salah satu fungsi hutan mangrove adalah sebagai tempat berkembangbiaknya anakan ikan dan udang serta menahan sedimentasi yang berasal dari daerah hulunya. Selain itu tambak-tambak yang telah dibuka tidak dapat dipungut pajaknya dari para pemilik tambak karena tidak memiliki sertifikat, padahal potensi pendapatan bagi daerah akan sangat besar. Hal ini dikarenakan lahan tambak yang ada masuk ke dalam kawasan cagar alam sehingga tidak dapat diberikan hak berupa sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional. Lahan tambak yang ada biasanya hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diberikan oleh kepala desa setempat. Akibat lain adalah sukarnya mengendalikan penebangan hutan mangrove karena akan membawa dampak yang dilematis, karena masyarakat telah tinggal jauh sebelum kawasan tersebut dinyatakan sebagai kawasan cagar alam. Pemerintah Kabupaten Pasir sejak tahun 1998 telah mengusulkan adanya Revisi Tata Ruang Provinsi Kaltim berupa penataan lahan daerah yang sudah terbuka. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk disetujui oleh pemerintah provinsi dan pusat. ■

Romif Erwinadi dan Surodal
(Staf Bappeda Kabupaten Pasir)

BEBERAPA JENIS BURUNG YANG DITEMUKAN DI TELUK BALIKPAPAN



Elang Bondol
(*Heliastur indus*)



Elang Hitam
(*Ictinaeus malayensis*)



Elang Laut
(*Haliaeetus leucogaster*)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tahun 1999, di Teluk Balikpapan ditemukan beberapa ekor spesies burung yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya. Burung-burung tersebut tidak hanya mendiami wilayah sepanjang garis pantai tetapi juga wilayah Daerah Aliran Sungai Teluk Balikpapan. Beberapa di antara burung tersebut tinggal di pohon-pohon di sepanjang pantai dan mencari makan di perairan Teluk Balikpapan seperti Elang Laut (*Haliaeetus leucogaster*) dan Raja Udang (*Todirhamphus chloris*). Burung-burung ini hanya sebagian kecil dari sumberdaya burung yang ada di DAS Teluk Balikpapan. Survey detail masih diperlukan untuk mengetahui keanekaragaman jenis burung dan populasinya sehingga pengelolaan kawasan Teluk Balikpapan juga dapat menjaga keberadaan burung-burung tersebut. (Gambar burung diambil dari "A Field Guide To The Birds of Borneo, Sumatra, Java and Bali).



Raja Udang
(*Todirhamphus chloris*)



Rangkong
(*Aceros undulatus*)



Layang - layang Batu
(*Hirundo tahitica*)

Ragam Daftar Istilah

- **Cagar Alam** adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan tumbuhan yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- **Adopsi Formal** adalah diterimanya dokumen perencanaan secara resmi oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) atau bersepakat melalui suatu acara penandatanganan naskah perjanjian kerjasama.
- **Kelembagaan** adalah merupakan suatu tatanan dalam masyarakat yang melakukan suatu kegiatan. Kelembagaan ini memberi dorongan ataupun hambatan bagi individu dan anggota masyarakat dalam bertindak.
- **Aksi Awal** (*early action*) adalah Serangkaian kegiatan yang mengawali atau berjalan secara paralel sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis Pengelolaan Teluk Balikpapan dimana respon dari kegiatan ini dapat langsung menjadi masukan dalam proses perencanaan.
- **Sentralistis** adalah Suatu pengambilan keputusan organisasi yang kebanyakan merupakan keputusan strategis dan operasi dilakukan oleh para pimpinan puncak dari struktur organisasi.

Kuis

Jawaban Kuis Edisi V Mei 2002 adalah (b) Pesut.

Selamat kepada 5 pemenang kuis Edisi V Mei 2002 yaitu :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Petrus Dewo
Radio Paras 103 FM
Jl. Rambutan No.5 Samarinda
(using@detik.com) | 3. Awaluddin
SMK Negeri I Bontang
Jl. Keuangan No.3 RT 32 RW 13 Tanjung Laut
Bontang Selatan | 5. Noor Asiah
Jl. Jend. A. Yani No. 38 RT 04 RW 02
Balikpapan |
| 2. Adief Mulyadi
Jl. Sultan Syahrir RT 34 RW 13 No.14
Tanjung Laut, Bontang 75321
(Amulyadis@yahoo.com) | 4. Jamaluddin
SMK Negeri I Tanah Grogot
Jl. Ki Hajar Dewantara
Tanah Grogot 76211 | |

Hadiah akan dikirim ke alamat pemenang oleh Redaksi Tirta PELA.

Tirta PELA

Buletin bulanan (*monthly newsletter*) diterbitkan atas kerjasama CRMP/Proyek Pesisir KalTim dengan Pusat Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Air (PPPSA) Universitas Mulawarman. **Penanggung Jawab:** Jacobus J. Wenno **Tim Komunikasi Proyek Pesisir:** Maurice Knight, Stacy Tighe, Adi Wiyana, Kun Hidayat, Ahmad Husein, Tammy Carolina **Pemimpin Redaksi:** Sigit Hardwinarto **Wakil Pemimpin Redaksi:** Elisabeth B. Wetik **Dewan Redaksi:** Agustinus Taufik, Ahmad Syafei Sidik, Niel Makinuddin, M. Yusuf Wahab, Rosmarini, Romif Erwinadi, Surodal, MIsnaeni, Zulfikar, M. Khasali H, Achmad Setiadi, Ramon, Ari Kristiyani, Eka Sri Utami, M. Farid Fadillah, Agus Hermansyah, Bambang, Jufriansyah, E. Jarot, Erlina **Alamat Redaksi:** Jl. R.E. Martadinata No. 03 RT 28 RW 10, Mekar Sari, Balikpapan 76121, Kalimantan Timur, Indonesia. Telepon: 0542-731016. Fax: 0542-731858. E-mail: tirtapela@yahoo.com

